

TOP! ANGGARAN PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA 2023 TERTINGGI SEPANJANG MASA



cNBCindonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada 2023 anggaran pendidikan di tanah air mencapai titik tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan di dalam APBN 2023 mencapai Rp 612,2 triliun. Angka ini tertinggi sepanjang anggaran pendidikan di Indonesia. "Untuk pertama kali dalam sejarah kita, anggaran pendidikan kita mencapai di atas Rp 600 triliun, yakni Rp 612,2 triliun," jelas Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2023. Sri Mulyani juga kembali menengok saat dirinya pertama kali pulang ke tanah air untuk menjadi menteri keuangan usai didaulat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, pada 2005 silam.

Dia bilang bahwa saat itu, anggaran pendidikan di Indonesia hanya mencapai Rp 500 triliun. "Sekarang total belanja pendidikan lebih besar dari Rp 600 triliun," kata Sri Mulyani lagi. Penggunaan anggaran pendidikan pun, kata Sri Mulyani merata dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan, kata Sri Mulyani pemerintah juga memberikan dukungan yang lebih fleksibel dan inovatif lewat dana abadi untuk pendidikan. "Dana abadi pendidikan kini telah mencapai lebih dari Rp 129 triliun. Uang itu untuk dapat memberikan dukungan pendidikan, penelitian, dan kebutuhan semua sektoral untuk meningkatkan kualitas indeks manusia," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menilai penting bagi suatu bangsa untuk terus mencari cara menerjemahkan komitmen anggaran pendidikan dalam bentuk kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun, anggaran pendidikan yang disebut Sri Mulyani tersebut juga termasuk untuk pemberian beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang mengelola dana abadi, dan telah menghasilkan hampir 18.000 lulusan dan sebanyak 35.536 beasiswa telah diberikan.

Belum optimalnya penggunaan anggaran belanja pendidikan untuk pengembangan kualitas manusia Indonesia juga tercermin dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN serta negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangun Ekonomi (OECD). PISA merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh OECD, untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia.

Pada 2018 lalu, sejumlah siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak di masing-masing negara untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains.

PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan (aplikasikan) dengan pengetahuannya. Hasilnya untuk kemampuan membaca, skor siswa Indonesia mencapai 371 berada di bawah skor rata-rata negara OECD yakni sebesar 487. Capaian skor rendah juga didapat Indonesia untuk bidang matematika (379) dan sains (396).

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230201185032-4-410182/top-anggaran-pendidikan-ri-2023-tertinggi-sepanjang-masa>, Top! Anggaran Pendidikan RI 2023 Tertinggi Sepanjang Masa, Kamis 2 Februari 2023
2. <https://ekbis.sindonews.com/read/1012245/33/anggaran-pendidikan-2023-tembus-rp612-triliun-tertinggi-sepanjang-sejarah-1675310538>, Anggaran Pendidikan 2023 Tembus Rp612 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah, Kamis 2 Februari 2023

Catatan Berita:

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Pasal 1:
 - (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

- (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 49:

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.